

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESEDIAAN
MENJADI WALI NIKAH DENGAN SYARAT DIBERI UANG
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)**

SKRIPSI

Oleh :

Wahyu Alvi Nasrulloh

NIM: C91215159



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Alvi Nasrulloh
NIM : C91215159
Semester : IX
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
JudulSkripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kesiediaan
Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama
GunungAnyar)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Wahyu Alvi Nasrulloh

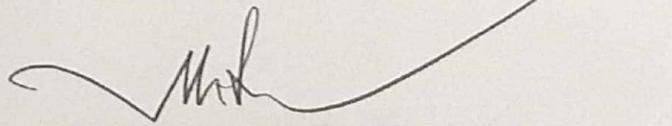
NIM. C91215159

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah Dengan Syarat Diberi Uang (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar) yang ditulis oleh Wahyu Alvi Narulloh NIM. C91215159 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2019

Pembimbing,



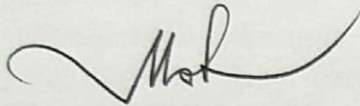
Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Alvi Nasrulloh NIM. C91215159 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

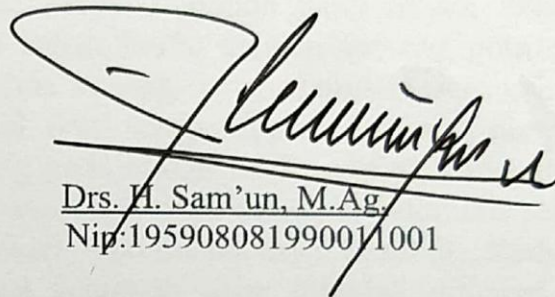
Majelis Munaqasah Skripsi.

Penguji I,



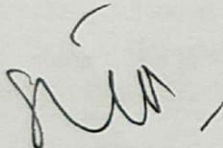
Dr. H. Masruhan, M.Ag.
Nip:195904041988031003

Penguji II,



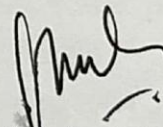
Drs. H. Sam'un, M.Ag.
Nip:195908081990011001

Penguji III,



Muh. Sholehudin, MHI.
Nip: 197707252008011009

Penguji IV,



Hj. Nurul Asiya Nadhifa, M.HI
Nip:197504232003122001

Surabaya 29 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
Nip:195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYU ALVI NASRULLOH
NIM : C91215159
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : Wahyu Alvi79c@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG WALINYA MEMINTA
SYARAT SEJUMLAH UANG (STUDI KASUS KUA GUNUNG ANYAR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 desember 2019

Penulis

Wahyu Alvi Nasrulloh

Adapun urutan wali nikah menurut Abu hanifah hanya hanya diperlukan dalam pernikahan seorang anak perempuan yang belum balik atau yang kurang sempurna akalnya. Dan bahwa para wali atau kerabat terdekat hanya dibolehkan menghalangi pernikahan seorang perempuan yang baligh dan berakal sehat, apabila ia menikahkan dirinya dengan laki laki yaang tidak kufu' atau maharnya tidak sesuai dengan jumlah mahar yang layak bagi perempuan yang sepadan dengannya.

Dalam kasus-kasus seperti itu maka urutan para wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan, dalam madzhab Abu hanifah, adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i (yakni mereka yang tergolong '*ashabah* atau kerabat laki-laki terdekat dari pihak ayah). Kecuali bahwa anak laki-laki dari perempuan yang akan menikah memiliki hak pertama sebelum ayah dan kakek, berbeda dalam madzhab Syafi'i yang justru tidak memberikan hak perwalian pada anak.

Perbedaan lainnya adalah dalam keadaan kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada, maka masih ada lagi orang yang berhak menjadi wali yaitu para kerabat dekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan yaitu:

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah).
2. Neneknya (ibu dari ayah, ibu dari ibu).
3. Anak perempuannya
4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki).
5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)

1. Wacana perempuan (*Womanhood*). *Akad* perkawinan itu tidak absah tanpa adanya wali yang mewakili si wanita itu. Ia tidak boleh menyatakan dirinya sendiri siap dalam perkawinan itu. Juga tidak boleh menentukan wakil kecuali memang orang yang secara hukum Islam berhak menjadi walinya. Hal itu berlaku bagi semua wanita tanpa mempedulikan usia, kondisi fisik atau status (perawan atau janda). Tapi tidak berarti pula, si wanita boleh dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Wanita itu mempunyai otoritas. Jika wali bersikap diktator atau terlalu memaksakan kehendaknya, si wanita boleh mengabaikan kedudukan lembaga itu dalam *akad* perkawinan. Tapi lebih baik adalah, waita itu meminta wanita lain yang benar menurut hukum yang ia kehendaki. Dalam hal ini, wali haruslah memberi hak sepenuhnya kepada si wanita untuk menyatakan pertimbangannya. Dan setiap kepentingan wanita tersebut yang masuk akal haruslah dilindungi .

Berbagai ulama ahli hukum Islam memang berpegang teguh pada pengertian wali dalam perkawinan itu lebih bersifat kewajiban ketimbang hak. Paling tidak merupakan sintesa antara keduanya. Artinya: wali mempunyai hak untuk merundingkan dan memutuskan *akad* perkawinan. Ia harus menolak pilihan wanita yang ada di bawah perwaliannya, jika pilihan itu dianggap kurang tepat atau kurang benar. Kini kewajibannya justru menunjukkan haknya untuk kepentingan wanita itu sendiri. Ia boleh menggunakan kebijaksanaan dalam mempertimbangkan perintah yang harus ditaati oleh wanita yang ada di bawah perwaliannya itu. Agar ia mampu

pencatatan pernikahan, dan bimbingan Keluarga Sakinah oleh para Penyuluh Agama Islam.

B. Deskripsi Kesiediaan Menjadi Wali nikah dengan Syarat Diberi Uang.

Cerita bermula ketika Rina (nama samaran) yang sebenarnya asli orang Situbondo kemudian tinggal bersama Bapaknya di Jember, Rina ialah seorang mahasisiwi disalah satu perguruan tinggi yang berada di jember, Rina mengambil jurusan ekonomi di fakultas tersebut, setelah lulus kuliah Rina memutuskan untuk merantau di Surabaya. kemudian Rina bekerja di salah satu bank yang berada di surabaya.

Sebagai manusia Rina juga membutuhkan pendamping hidup, maka Rina memutuskan untuk mencari pasangan hidup. Berbeda dengan orang-orang dalam mencari jodoh atau pasangan hidup, Rina mencoba untuk mencari jodoh melalui sebuah situs internet. Dari sinilah kisah asmara Rina bermula, tidak membutuhkan waktu lama akhirnya Rina menemukan teman dari sebuah situs tersebut yang berasal dari negara kroasia, pria asal Kroasia tersebut mampu membuat Rina merasa nyaman dan memiliki teman, meskipun hanya sebatas medsos. Seiring bergantinya waktu akhirnya Rina mempunyai rasa kepada pria kroasia tersebut.

Tidak membutuhkan waktu lama bagi Rina dan pria kroasia tersebut untuk memberanikan diri melangkah kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, sebenarnya pria dari kroasia tersebut umurnya sangat jauh

- Jazairi (al), Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhāhib al-Arbā'ah*, juz IV Kairo: M. Tatang Amin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Musthafa al-Baby al-Halaby, 1986.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moh. Ramulyo Idris, *Hukum perkawinan islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Njubaidah Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatatkan* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Qazniy (al), Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Al-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Tasil, 2014.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Sitakar, Jali. "Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim Menurut Pasal 23 Komplikasi Hukum Islam Ditinjau dari Hukum Islam (Study kasus di Kabupaten Rokan Hulu)" (Tesis—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Alfabeta, Cv. Jl. Gegerkalong Hilir NO. 84 Bandung 2009)*
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

